

Petani Tetap Menolak Penambangan

WATES, KOMPAS - Para petani lahan pasir Pantai Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersikukuh menolak penambangan pasir besi di wilayah itu karena hanya akan merugikan petani.

Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo Supriyadi menyatakan, rencana pemerintah pusat untuk merealisasikan penambangan pasir besi pada tahun 2011, seperti yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dinilai merupakan pancingan untuk memengaruhi sikap petani.

"Rencana itu tidak menggoyahkan sikap kami untuk menolak keberadaan tambang," kata Supriyadi, Rabu (15/10) di Wates, Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo menyatakan, Selasa lalu pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah pusat melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hendak menandatangani kontrak karya penambangan pasir besi di Kulon Progo. Diperkirakan kegiatan tambang terealisasi tahun 2011 selama minimal 20 tahun.

Namun, Presiden Direktur PT Jogja Magasa Mining (JMM) Luthfi Heyder, selaku penambang pasir besi, mengaku belum dihubungi Departemen ESDM terkait kontrak karya.

Kontrak karya penambangan pasir besi di Kulon Progo diajukan ke pemerintah pusat sejak akhir 2007. Kontrak karya itu telah disetujui Komisi VII DPR pada 16 November 2007.

Menurut Luthfi, jika mengacu pada rencana awal, seharusnya kegiatan penambangan berjalan pada pertengahan 2008, dilanjutkan pendirian pabrik konsentrat besi pada Agustus 2008, dan pengolahan besi mentah pada Desember 2009.

Supriyadi menilai rencana pemerintah pusat untuk merealisasikan penambangan pasir besi merupakan indikasi bahwa pemerintah tidak peka terhadap permasalahan rakyat. Untuk itu PPLP Kulon Progo akan berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, selaku kuasa hukum PPLP, mengenai sikap petani lebih lanjut. Ada kemungkinan petani akan menghadap Presiden untuk membicarakan masalah ini.

Beberapa petani lahan pasir yang ditemui mengaku kebingungan menentukan sikap karena ketidakjelasan rencana penambangan pasir besi dan jenuh dengan pro-kontra yang terus terjadi.

Lasiman (42), petani di Desa Banaran, Kecamatan Galur, misalnya, menyadari bahwa lahan garapannya bukan berstatus hak milik, melainkan milik Paku Alam. Dengan demikian, kewenangan penggunaan lahan sebenarnya berada di tangan Paku Alam IX.

Di sisi lain, Lasiman tidak rela jika lahan garapannya diserobot paksa oleh pihak penambang tanpa ada kejelasan ganti rugi.

"Kami sebenarnya mengharapkan Paku Alam IX selaku pemilik lahan atau Ngarso Dalem Hamengku Buwono X selaku pemimpin daerah datang langsung menemui petani. Kami ingin mendengar penjelasan tentang rencana penambangan pasir besi sehingga kami bisa mendapat keyakinan dan kepastian sikap," kata Lasiman. (YOP)